



Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nissa Nurimani¹, Putri Wahyuningsih², Dinda Yusti³

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstract

Received: 14 Januari 2023
Revised: 21 Januari 2023
Accepted: 30 Januari 2023

Political culture can also represent value systems and people who are enlightened enough to take part in collective decision-making and the formulation of public policies for everyone, and can also reflect patterns of circumstances in the life of a country. Comparing Indonesian and Japanese political cultures reveals that each has a distinct culture and political identity that is unique to the nation. Every nation seeks to transition to democratic politics by adopting a political culture that is rooted in the people, which enables these nations to achieve their goal of serving the country. Corruption and democracy are two things that can fall apart like a double-edged knife and are one of the consequences of a country determining a democratic system. This research collects data using literature study and qualitative methodology. Because Japanese society instills a Culture of Shame from an early age, it can be said that efforts have been made to eradicate corruption in the country using Law Enforcement & Prevention Efforts through these means. Malay teachings, which are a reflection of morality, are a summary of Malay culture for the Indonesian people and represent their shame.

Keywords: Democracy, State, Comparison

(*) Corresponding Author: Nissanurimani696@gmail.com

How to Cite: Nurimani, N., Wahyuningsih, P., & Yusti, D. (2023). Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 393-401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7752569>

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan salah satu topik dalam ilmu politik yang akan selalu dipelajari karena merupakan nilai yang dapat mencerminkan pola masyarakat dalam kehidupan bernegara dan selalu menyampaikan nilai masyarakat yang cukup tercerahkan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan kolektif dan perumusan kebijakan publik untuk seluruh rakyat. Budaya politik suatu bangsa seringkali ambigu dan cenderung larut dalam era globalisasi. Masyarakat global didesak untuk lebih memperhatikan budaya orang lain dan banyaknya segi perbedaan budaya di era globalisasi ini. (Suryo, 2015)

Menurut kuesioner Indonesia ditempatkan menjadi negara terkorup pada Asia Pasifik tahun 2010. Sedangkan hasil satu indikator korupsi politik yang biasa dipakai merupakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurut Transparency Internasional (TI) tahun 2013 menempatkan Indonesia pada urutan ke 114 dari 180 negara (Political & Economic Risk Consultancy (PRC)). Hal tersebutlah yang menjadi fokus seluruh kalangan baik rakyat juga pemerintah buat memberantas korupsi menggunakan segala upaya, alat satunya menggunakan memakai perspektif budaya. Selain itu faktor lainnya merupakan Globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang tidak mengenal batas daerah & menghubungkan antara rakyat pada suatu negara menggunakan rakyat pada negara lain pada semua global & pembangunan maju yang disebut Modernisasi.



Indonesia pada posisinya menjadi alat satu negara berkembang pada global berusaha menciptakan pembenahan pada segala bidang & aneka macam aspek buat mengangkat keteringgalannya. Salah satunya merupakan korupsi yang terjadi pada proses pembangunan yang dilakukan sang oknum-oknum yang terlibat didalamnya. Indonesia menjadi alat satu negara berkembang pada global pula mengalami dampak menurut pesatnya efek globalisasi. Globalisasi membawa dampak baik dan buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain. Pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk politik, ekonomi, dan sosial yang semuanya pada akhirnya membentuk budaya bangsa seperti Indonesia.

Sebagai negara bandingan, Jepang dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Transparency Internasional (TI) dalam tahun 2013 ditempatkan dalam urutan 18. Sejak dahulu Jepang dikenal menjadi bangsa yang menjunjung tinggi rasa membuat malu, orang Jepang populer menggunakan . Arti harfiah : “Potong Perut” merupakan suatu bentuk ritual bunuh diri. Seppuku merupakan bagian menurut kode kehormatan bushido atau menjadi bentuk sanksi tewas yang sudah melakukan pelanggaran berfokus atau dilakukan menurut perbuatan lain yang memalukan. (Padmi,2015)

Penanggulangan perkara korupsi menggunakan hubungan suatu taktik penindakan & pencegahan. Kejahatan korupsi artinya gosip sentral dalam penegakan aturan. Di era reformasi, berbagai prakarsa pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah menggunakan berbagai strategi nasional, antara lain Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2011 tentang Aksi untuk Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Jangka Panjang. (2012-2025 & Jangka Menengah (2012-2014)).

Tradisi Seppuku yang mengakar pula dirasakan dampaknya dalam global perpolitikan Jepang. Budaya berpolitik pada sebuah negara sangat ditentukan sang karakter dasar rakyat secara umum dikuasai negara tadi. Oleh karena itu, sebagai prinsip yang dijalankan sang para politikus pada kegiatan politiknya pada Jepang. Dalam hal korupsi Jepang tidak mempunyai forum spesifik juga undang-undang spesifik yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi misalnya yang terdapat pada Indonesia yang mempunyai KPK, Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) & undang-undang spesifik tentang korupsi termasuk UUTPPU (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam sistem aturan Jepang, korupsi disamakan perlakuannya misalnya tindak pidana umum. Berhasilnya pemerintahan Jepang pada membersihkan institusi & menang pada perang melawan korupsi tidak menurut dukungan rakyat & menggunakan budaya membuat malu menurut rakyat yang bertenaga. Walaupun tidak terdapat undang-undang juga forum spesifik yang menangani tindak pidana korupsi, tetapi menurut data yang dihimpun Transparency International, Jepang termasuk negara menggunakan taraf korupsi yang tergolong rendah. Hal ini ditimbulkan adanya budaya penegakan aturan “Malu”.

Di Jepang budaya inilah yang sebagai senjata primer pada pencegahan korupsi. Media pada Jepang pula berperan krusial pada membuat kabar korupsi sebagai akibatnya rakyat eksklusif memahami & membangun tekanan

publik supaya orang yang dievaluasi korupsi segera mundur. Berkaca menurut Jepang, Indonesia yang notabene pula negara Asia mempunyai kultur budaya yang hampir sama, yaitu lekatnya budaya nenek moyang yang secara turun temurun dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Namun perkembangannya sangat jauh berbeda, Jepang menggunakan budaya malunya sanggup bertahan Linier pada prakteknya menurut rakyat bawah sampai kondisi elit pemerintah pada penegakkan antikorupsi. Sedangkan Indonesia nilai-nilai itu sulit kita jumpai dalam masa sekarang yang berlangsung pada pemerintahan masa Orde Baru yang langgeng sampai kini Mengganggu nilai-nilai kebudayaan & kebiasaan-kebiasaan kepercayaan yang selama ini sebagai benteng peranan pada kehidupan berpolitik juga pada kehidupan sehari-hari bahkan terkandung pada ideology Indonesia Pancasila dalam sila pertama. (Padmi,2015) Budaya politik adalah kumpulan informasi, keadaan emosi, dan penilaian moral dari rumor politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Cara berpikir dan berbuat ini akan menjadi pokok indikator politik dalam sistem politik. Gagasan budaya politik sering dikaitkan dengan gagasan budaya bangsa atau negara. Dalam hal ini, budaya politik adalah manifestasi fisik dari sebuah teori yang mengklaim menggunakan karakter bangsa yang terdiri dari berbagai ide, simbol, dan nilai yang menjadi konteks terjadinya peristiwa politik. Budaya dijelaskan oleh Schirato & Yell sebagai "pemahaman sistem makna dan kapasitas untuk menavigasi sistem semacam itu di berbagai latar budaya." Setiap orang masih memiliki budaya politik yang mengekspresikan bagaimana mereka melihat aktivitas politik yang terjadi di dalam masyarakat mereka sendiri. Jumlah kesadaran dan keterlibatan publik sangat penting untuk mengukur seberapa baik budaya politik berkembang. Budaya politik meliputi legitimasi, dinamika kekuasaan, perumusan kebijakan publik, kerja partai politik, status mesin negara, dan pemberontakan penduduk melawan kelas penguasa. Oleh karena itu, budaya politik eksklusif mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan secara nasional (Suryo, 2015).

Selain itu, keterlibatan politik komunitas negara terkait erat dengan masalah budaya politik. Karena terdapat institusi politik dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi penekan, dan media, keterlibatan politik harus menjadi unsur budaya politik. Perbandingan budaya politik Indonesia-Jepang menggunakan melihat aneka macam faktor yang sudah dipilih pada penelitian ini menjadi parameter penelitian merupakan Nilai-nilai & moral rakyat, taraf agama rakyat Trust, bukti diri nasional & integritas antara Indonesia & Jepang. (Padmi,2015) Menurut Juniadi Suwantojo (1997), "Korupsi berarti tingkah laku atau tindakan satu orang atau lebih yang melanggar kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui penetapan pemungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam penerimaan. kegiatan & menghabiskan uang atau kekayaan, menyimpan uang atau kekayaan, dan dalam perizinan layanan lain dengan tujuan keuntungan langsung atau kelompoknya sebagai akibat dari keberadaan Definisi korupsi, menurut Brooks (Klitgaard 2001), adalah "sengaja menciptakan kesalahan atau mengabaikan tugas-tugas yang dianggap wajib, atau tanpa hak untuk menggunakan wewenang, dengan maksud untuk menuai keuntungan langsung."

Selanjutnya Alfiler (pada Klitgaard 2001) mengemukakan bahwa korupsi merupakan: "Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards." (Dwiputrianti, 2009). Menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara. Itu dilakukan dengan tujuan menguntungkan orang lain (individu atau bisnis). Oleh karena itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu perilaku dianggap koruptif: harus melawan hukum, harus memperkaya pelaku atau orang lain, dan harus berpotensi merusak keuangan atau perekonomian negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam esai ini adalah kualitatif. Tinjauan literatur, yang berupa studi literatur dan dilakukan dengan menggunakan jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan terkait, digunakan untuk mengumpulkan data dan teori. Studi literatur dijelaskan oleh Creswell & Creswell (2018) sebagai kompilasi tekstual dari artikel jurnal, buku, dan bahan lain yang memberikan teori dan cakupan. Para peneliti mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan perbandingan strategi penerapan antikorupsi dua negara dalam jurnal dan makalah yang terkait dengan prosiding konferensi.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Agar gagasan budaya politik berhasil diterapkan, menurut Pye, diperlukan pemahaman struktur politik dari satu sisi untuk menghasilkan produk yang merepresentasikan budaya politik sekaligus "sistem nilai" yang membentuk budaya politik. Dengan menggunakan variabel-variabel penting seperti fungsi, pelaku, nilai, kebiasaan, tujuan, masukan, keluaran, dan reaksi, metode struktural-fungsional membuat asumsi bahwa struktur dalam masyarakat berdampak pada fungsi dalam bangsa (Personal Toto, 2014). Setiap bangsa memiliki adat istiadatnya sendiri, jadi penting untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan serta bagaimana politik berdampak pada lingkungan tersebut ketika membandingkan kinerja sistem politik satu negara dengan negara lain. Sistem politik menghasilkan kebijakan, idealnya yang berfokus pada kesejahteraan.

Kebiasaan yang dimiliki suatu bangsa dan hukuman bagi yang melanggarnya berfungsi untuk melindungi kesejahteraan yang masih ada dalam diri mereka, memberi mereka kesempatan untuk menegakkan tatanan sistem yang telah dibangun melalui budaya mereka. Meskipun mungkin masih ada "penyakit sosial" atau pelanggaran kebiasaan, mereka tidak akan dapat mengganggu cara orang menjalani kehidupannya, seperti yang terjadi di Jepang, di mana orang berhasil melestarikan "budaya malu" hingga saat ini. Jepang adalah negara kepulauan Asia Timur yang terletak di titik paling barat Samudra Pasifik, terdiri dari 6.852 pulau, dengan Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu berfungsi sebagai empat pulau utama. Pegunungan dan gunung berapi dapat ditemukan di sebagian besar pulau yang membentuk Jepang. Jepang adalah negara monarki konstitusional. Konstitusi menentukan peran Kaisar Jepang sebagai "lambang

negara dan pemersatu rakyat" dan sebagai kepala negara dalam hubungan internasional. Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang mengontrol pemerintahan negara, dan rakyat Jepang sendiri memiliki kedaulatan penuh. Ada Majelis Tinggi dan Majelis Rendah di Parlemen Jepang. Setiap empat tahun, rakyat langsung memilih anggota majelis rendah. Jika majelis rendah dibubarkan, majelis tinggi kemudian dipilih setiap enam tahun. Anggota Parlemen memilih Perdana Menteri, yang kemudian dipilih. Jika Majelis Rendah dan Majelis Tinggi memiliki calon perdana menteri, pilihan Majelis Rendah akan berlaku (Niladibrata, 2020).

Perdana Menteri Jepang bisa memerintah selama partai atau koalisi partai yang berkuasa mendukungnya. Tapi selama beberapa tahun terakhir usia pemerintahan Perdana Menteri Jepang tidak terlalu usang, bahkan pada beberapa perkara hanya memerintah selama kurang menurut satu tahun. Ketidakpastian masa jabatan ini dipercaya menjadi alat satu penyebab terjadinya perkara korupsi pada pemerintahan Jepang. Masa jabatan yang tidak niscaya bagi para pejabat politik mengakibatkan godaan suap pada pemerintahan sangat bertenaga, terutama yang berkaitan menggunakan janji kerja pada masa depan. Terlepas menurut seluruh itu, agama rakyat terhadap pemerintah tetaplah tinggi.

Karena budaya penghinaan mereka, orang Jepang sangat mungkin melakukan bunuh diri sesuai dengan adat Seppuku jika diketahui bahwa mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun Jepang tidak memiliki undang-undang khusus yang menargetkan pemberantasan korupsi dan hukuman bagi koruptor hanya 7 (tujuh) tahun penjara, namun hukuman karena mempermalukan seseorang dianggap sebagai hukuman yang paling berat. Keterlibatan media dalam meliput peristiwa korupsi membantu hal ini (Kosasih, 2019). Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar keempat yang terdapat pada global.

Indonesia mempunyai aneka macam karakter penduduk, baik menurut suku, bahasa, etnis, dan kepercayaan & aneka macam segi lainnya. Wilayah yang terdapat pada Indonesia pun sangatlah terbentang luas terdiri menurut 17.000-an pulau besar & kecil, dan sebagian besar menurut pulau terbesar letaknya sangat terpencil menurut kehidupan ramai, kompleksitas & keragaman sangat memilih peta menurut konfigurasi kekuatan politik pada rakyat, sampai tidak mampu kita hindari akan keharusan berkembangnya sebuah system multi-partai pada system demokrasi yang hendak dibangun. Agar peta konfigurasi kekuatan politik dalam sebuah rakyat bisa disalurkan menggunakan baik dari mekanisme demokrasi (Procedural democracy).

Di lihat aspek historis pembentukan suatu forum politik baik pada Indonesia ataupun pada Jepang sebelum tahun 1945, dimana keduanya menurut aneka macam negara yang sudah lebih dahulu terdapat. Di Indonesia keberagaman politik misalnya partai politik ataupun forum perwakilan telah terdapat semenjak zaman colonial Belanda, sebuah partai dibangun menjadi suatu gerakan buat memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Lembaga perwakilan dibangun oleh pemerintah colonial guna kepentingan mereka. Sedangkan Jepang mempunyai partai politik & forum perwakilan yang dibuat atas dasar pertimbangan buat mengantisipasi perkembangan Jepang Modern buat menyalip ketertinggalanya

menurut negara barat. Hal tadi bisa ditinjau menurut adanya sebuah disparitas yang besar menurut suatu proses terbentuknya kelembagaan politik.

Pada prosesnya sebuah pembuatan kebijakan baik oleh Jepang juga Indonesia keduanya sangat bergantung dalam sebuah birokrasi, hal tadi lantaran birokrasi memiliki dominasi secara teknis & liputan dan adanya pengalaman yang lebih akan kebijakan yang terdapat. Hal tadi kebijakan rakyat (kebijakan public), dimana pembahasan & penetapannya menggunakan prosedur politik akan namun dalam prosesnya penyusunan & penelitian pada pembahasan melibatkan energi-energi birokrat yang terpercaya. Dalam kondisinya, pada Indonesia sebuah birokrasi cenderung tidak bisa melepaskan diri menurut politik, Di sisi lain, para birokrat seringkali berpaling kepada para politisi untuk mengamankan posisinya dalam posisi birokrasi yang masih kuat hegemoni politik para politisi terhadap birokrasi, khususnya dalam penentuan jabatan, yang terkadang dapat meninggalkan prinsip profesionalisme. Sebaliknya, Jepang justru melindungi & menjaga birokrasi yang profesional, bukan dengan mempertahankan jabatan menurut kepala departemen atau pelaksana pemerintahan menurut politisi.

Diskusi

Secara garis besar Kondisi menurut birokrasi pada Jepang sangat bertenaga menggunakan adanya bukti tidak terpengaruhnya syarat politik yang labil, seringkali adanya sebuah perdebatan & perselisihan antar politisi partai tidak bisa mempengaruhi suatu kinerja birokrasi. Di sisi lain, negara Indonesia dimana syarat politik yang masih labil sangat mensugesti kinerja menurut birokrasi.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat berat. Akibat dari kejahatan ini, baik penduduk Indonesia maupun keuangan negara dapat dirugikan. Kejahatan korupsi merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia, dan banyak strategi yang digunakan untuk memeranginya melalui penegakan dan pencegahan kejahatan ini. Satu-satunya instrumen yang menggunakan kearifan lokal adalah gagasan pencegahan korupsi. Kearifan lokal adalah tradisi yang dapat mengatur sesuai dengan sistem yang mengontrol perilaku masyarakat secara bijaksana dan hati-hati. Kearifan lokal, juga dikenal sebagai ketidaksadaran kolektif masyarakat, memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dengan mengatur apa yang dikenal sebagai norma dan hukum. Menurut Teori Volkgeist Von Savigny (Jiwa Negara), hukum diciptakan untuk menciptakan lingkungan yang tenang yang difokuskan untuk mempromosikan perdamaian publik dan diselenggarakan dalam jiwa rakyat dan bangsa Indonesia. Aturan yang baik dan memenuhi kebutuhan adalah aturan yang muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Hal ini karena persoalan aturan dimulai dari bawah dan memiliki pengaruh yang mengarah pada pembentukan aturan.

Pada suatu kehidupan bangsa & bernegara terlebih khususnya pada Indonesia dalam waktu ini budaya membuat malu belum sebagai suatu berukuran buat dijadikan sebuah prinsip & pegangan pada melaksanakan aktivitasnya pada sebuah kepemimpinan public atau aktivitas yang sebagai sritauladan pada kalangan rakyat dalam biasanya sebagai akibatnya sangat sulit buat mencari tokoh atau figure yang mampu sebagai model buat bisa teladani, bisa kita ketahui bahwa pada negara Indonesia mempunyai sebuah tradisi yang sanggup

mengontrol rapiakan kehidupan bermasyarakat yang biasa dikenal menggunakan sebutan “kearifan lokal”. Dalam kearifan lokal ini kita dapati sebuah tatanan kehidupan & kebijaksanaan hayati masyaakat Indonesia. Adanya sebuah kearifan lokal ini sangatlah krusial pada pendidikan secara lebih luas dimana hal tadi sebagai bagian menurut bisnis buat mampu mempertinggi suatu ketahanan nasional menjadi bangsa Indonesia. Ini dapat menunda krisis budaya & identitas, khususnya yang berkaitan dengan masalah korupsi, dengan mengembangkan kearifan lokal yang terkait dengan penggunaan budaya malu. Hal itu dinilai terkait bagaimana pemerintah Jepang memberantas korupsi dengan mengandalkan kearifan lokal yang memalukan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moralitas atau kesusilaan untuk menjatuhkan hukuman alam, negara Jepang malu dengan pentingnya pengetahuan budaya lokal. Menurut China kuno, negara Jepang adalah bangsa yang sangat mengutamakan moral. Di Jepang, ajaran Konfusianisme diterapkan pada tugas-tugas birokrasi sehari-hari dan pengejaran keuntungan finansial sembari menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Promosi budaya malu membutuhkan interaksi dengan penduduk.

Usaha yang bisa dilakukan buat pengendalian korupsi pada Indonesia diantaranya: Upaya preventif yang bisa dilaksanakan terhadap sebuah bisnis preventif ini yakni kejaksaan akan melakukan sebuah aktivitas dalam sebuah acara pelatihan rakyat dirapikan aturan menggunakan cara penyuluhan dalam sekolah-sekolah dan pedesaan yang mana bisa dilaksanakan oleh Badan Intelejen. Memberikan sebuah hukuman & sanksi yang bersifat relative berat sampai mengakibatkan sebuah dampak jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Mempersiapkan jaksa penyidik & jaksa Penuntut Umum yang professional dan mempunyai integritas moral yang tinggi menggunakan melalui training diklat. Usaha Refresif, Usaha Untuk Jangka Panjang yakni yang pertama pendidikan, membiasakan diri & masyarakat buat tidak korupsi. Kedua, menciptakan budaya anti korupsi. Ketiga, melakukan sebuah supervisi menurut luar & pula menurut pada yang sah-h Sahih mengawasi bukan hanya mencari laba menggunakan mencari uang buat bekerja menjadi pengawas. Proses peradilan dilakukan secara menyeluruh dan terbuka, dengan individu yang melanggar hukum terlebih dahulu mendapatkan teguran sebelum dipecat secara tidak hormat dan dijatuhi hukuman mati. Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki kekhasan, budaya, dan konsepnya masing-masing, sebagaimana diketahui secara luas.

Tidak ada kelompok etnis yang dapat mengklaim bahwa budaya mereka lebih unggul dari budaya lain karena bahasa satu kelompok etnis yang dituturkan oleh suku lain di Indonesia menyampaikan visi yang berbeda. Karena Budaya Malu merupakan aspek unik dari budaya Timur yang diterapkan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, meskipun masih dapat ditemukan dalam sajak, puisi, ungkapan, dan hal-hal lain yang mengandung nasihat, termasuk nasihat jujur yang diturunkan dari generasi ke generasi yang isinya adalah kebenaran, konsep Kearifan Lokal Budaya Malu sebagai Pencegahan Korupsi sebenarnya dapat dijadikan landasan perilaku sehari-hari. Budaya malu pada kenyataannya kini mulai perlahan menghilang di kalangan masyarakat pada umumnya dan terutama di kalangan generasi muda. Karena dampak Budaya Malu terhadap modernitas dan pembangunan harus dipertahankan dalam perilaku normatif masyarakat Indonesia (Sulistyawaty, 2019).

Contoh kasus korupsi Indonesia Dugaan korupsi dengan LNG di PT Pertamina merupakan salah satu model yang ditemukan di Indonesia. Dalam situasi ini, mencari solusi harus menjadi prioritas utama. Kejaksaan Agung sebelumnya menangani kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, KPK kemudian menerima kasus ini. KPK hingga kini belum menetapkan tersangka kasus LNG di PT Pertamina. Empat orang saksi, yakni Dosen IPB Anny Ratnawati, Anggota Dewan Komisaris Evita Herawati Legowo, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, dan mantan Dirut PT PLN Nur Pamudji, telah diperiksa.



Gambar 1. Diagram indicator korupsi pada Indonesia

Sumber:

Contoh Kasus Korupsi di Jepang

Jepang terus mengalami beberapa skandal korupsi meski memiliki posisi rendah pada Indeks Persepsi Korupsi. Bahkan di tengah skandal korupsi, ada beberapa yang cukup terkenal, seperti: (1) CEO yang mengungkap Skandal Lockheed mengatakan bahwa 16 anggota parlemen Jepang telah disuap untuk memungkinkan penjualan pesawat Lockheed ke Jepang. Pada tahun 1974, begitu masalah ini terungkap, Perdana Menteri Kakuei Tanaka terpaksa pensiun. (2) Skandal Perekrutan dimulai ketika Rekrut Cosmos Co. memberi anggota parlemen saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Tokyo sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam membantu Rekrut Cosmos Co. membagi bisnisnya dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Akibat keterlibatan partai LDP-nya dalam skandal Rekrutmen, Perdana Menteri Noboru Takeshita juga terpaksa mundur. (3) Skandal Kyubin, yang dilakukan oleh Sagawa Kyubin sebagai layanan parsel, yang melibatkan Sagawa Kyubin membayar sejumlah besar uang kepada pejabat partai LDP yang terlibat dalam industri transportasi sebagai imbalan atas dugaan "bantuan" mereka dalam membuat perusahaan menjadi besar. korporasi setelah diberikan lisensi tingkat nasional untuk layanan parsel. (Sulistiyawaty, 2019)

KESIMPULAN

Kebanyakan Orang Jepang populer menggunakan kerja kerasnya, disiplin, & berintegritas yang tinggi & yang mengakibatkan hal tadi merupakan Besarnya Rasa Malu. Karena masyarakat Jepang menanamkan Budaya Malu sejak dini, maka dapat dikatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi di negara tersebut menggunakan Upaya Penegakan Hukum & Pencegahan

melalui cara-cara tersebut. Ajaran Melayu yang merupakan cerminan dari budaya dan moral Melayu mengungkapkan budaya malu negara Indonesia. Karena pemerintah Jepang telah berhasil menekan pelanggaran korupsi melalui gagasan Budaya Budaya, sangat penting untuk memupuk budaya yang memalukan ini untuk menghindari korupsi. Istilah ini berdasarkan Tunjuk Ajaran dalam peribahasa dan pantun.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Novita Sari, D. Z. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam mewujudkan smart city. *Journal of Governance Innovation*.
- Dwiputrianti, S. (2009). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.
- Kosasih. (2019). ANALISIS BUDAYA MALU ORANG JEPANG DAHULU DAN SEKARANG. *Jurnal TEXTURA*.
- N., P. P. (2015). PERBANDINGAN BUDAYA POLITIK INDONESIA-JEPANG DALAM. *UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG*.
- Niladibrata, N. S. (2020). Sistem Pemerintah Jepang. https://www.academia.edu/9241181/Sistem_Pemerintahan_Jepang.
- Sulistiyawaty, S. P. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*.
- Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. *Jurnal Transformasi*.
- Toto Pribadi, A. M. (2014). Sistem Politik Indonesia. In: Pendekatan Dalam Sistem Analisis Politik. *Universitas Terbuka, Jakarta*, 1-34.
- Maulia, Ichda. Tt. Pemberantasan Korupsi di Jepang. Seminar Pemberantasan Korupsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan.
- Padmi, P (2015). Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.